

PENGADILAN AGAMA LOLAK
LAPORAN KEUANGAN
BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
Untuk Periode Triwulan III
yang Berakhir 30 September Tahun 2023



Jl. Trans Sulawesi, Desa. Dulangon, Kec. Lolak

Bolaang Mongondow - Sulawesi Utara 95761

Telp. (0434) 2608191

e-mail : pa.lolak.sulut@gmail.com


KATA PENGANTAR


Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Lolak adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Lolak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Lolak. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Lolak, Oktober 2023
Sekretaris,

Pachmat Enoch, S.Ag
NIP 19760209 200805 1 001



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	31
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	39
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
F. Pengungkapan Penting Lainnya	46
VI. Lampiran dan Daftar	48


**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO
PENGADILAN AGAMA LOLAK**


Jl. Trans Sulawesi, Dulangan, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow,
Provinsi Sulawesi Utara – 95761, Website : www.pa-lolak.go.id E-mail: pa.lolak.sulut@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Lolak yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Loalak, Oktober 2023
Secretaris,

Rachmat Enoch, S.Ag
NIP 19760209 200805 1 001



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Lolak Triwulan III Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Triwulan III TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 0,- atau mencapai 00.00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 0.

Realisasi Belanja Negara pada Triwulan III TA 2023 adalah sebesar Rp. 2,672,265,125 atau mencapai 74% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3,606,687,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 September 2023.

Nilai Aset per 30 September 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 24,272,794,659 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 18,164,000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 24,254,630,659; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0;

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 223,784,613; dan Rp 24,049,010,046,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional,

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2023 adalah sebesar Rp. 0; sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 3,331,500,786; sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp -3,331,500,786); Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 0; dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp -3,331,500,786,-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp 24,679,939,457; dikurangi Defisit-LO sebesar Rp -3,331,500,786, kemudian ditambah dengan Penyesuaian Nilai Aset Rp. 0, koreksi nilai aset tetap non revaluasi Rp 0, dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 2,700,571,375, dikurangi penurunan ekuitas sebesar Rp. 630,929,411, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 September 2023 adalah senilai Rp 24,049,010,046,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Triwulan III TA 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA LOLAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 SEPTEMBER TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	2,034,000	0	2,034,000
JUMLAH PENDAPATAN		0	2,034,000	0	2,034,000
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2	2,477,787,000	1,951,449,391	79%	1,853,347,159
Belanja Barang	B.3	1,118,900,000	720,815,734	64%	1,020,823,693
Belanja Modal	B.4	10,000,000	0	0%	406,170,000
JUMLAH BELANJA		3,606,687,000	2,672,265,125	74%	3,280,340,852

II. NERACA

**PENGADILAN AGAMA LOLAK
 NERACA
 PER 30 SEPTEMBER
 2023 DAN 2022**

(DalamRupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	17,000,000	-
Persediaan	C.2	1,164,000	45,000
JUMLAH ASET LANCAR		18,164,000	45,000
ASET TETAP			
Tanah	C.3	1,064,172,000	1,064,172,000
Peralatan dan Mesin	C.4	2,708,314,940	2,675,964,940
Gedung dan Bangunan	C.4	22,770,510,186	22,770,510,186
Aset Tetap Lainnya	C.5	357,209	357,209
Konstruksi dalam pengerjaan	C.6	22,953,573,167	4,983,393,588
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.7	(478,579,275)	(378,699,426)
JUMLAH ASET TETAP		24,254,630,659	24,697,011,457
JUMLAH ASET		24,272,794,659	24,748,321,457
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga		206,784,613	17,117,000
Uang Muka dari KPPN	C.8	17,000,000	51,265,000
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		223,784,613	68,382,000
JUMLAH KEWAJIBAN		223,784,613	68,382,000
EKUITAS			
Ekuitas			
Ekuitas	C.7	24,049,010,046	24,679,939,457
JUMLAH EKUITAS		24,049,010,046	24,679,939,457
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		24,272,794,659	24,748,321,457

III. LAPORAN OPERASIONAL

**PENGADILAN AGAMA LOLAK
 LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2,096,409,456	2,019,511,636
Beban Persediaan	D.3	35,398,000	37,931,850
Beban Barang dan Jasa	D.4	457,112,482	761,305,074
Beban Pemeliharaan	D.5	206,594,150	156,773,269
Beban Perjalanan Dinas	D.6	65,299,650	77,748,000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	470,687,048	447,096,507
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		3,331,500,786	3,500,366,336
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(3,331,500,786)	(3,500,366,336)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	267,193,824
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	267,193,824
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	267,193,824
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(3,331,500,786)	(3,233,172,512)
POS LUAR BIASA	D.12	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(3,331,500,786)	(3,233,172,512)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PENGADILAN AGAMA LOLAK
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	24,679,939,457	24,973,651,124
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3,331,500,786)	(3,233,172,512)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI		-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.5	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.6	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.7	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.8	-	-
LAIN-LAIN			
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		2,700,571,375	3,218,651,778
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(630,929,411)	(14,520,734)
EKUITAS AKHIR	E.8	24,049,010,046	24,959,130,390

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Lolak

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Tahun 2023 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2020 – 2024 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Agama Lolak pada tahun 2023 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Agama Lolak.

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Lolak sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Agama Lolak adalah :

“Mewujudkan Pengadilan Agama Lolak Yang Agung”

Misi Pengadilan Pengadilan Agama Lolak adalah :

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Lolak
2. Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Lolak Yang Moderen.
3. Meningkatkan Kualitas Dan Transparansi Sistem Administrasi Pengadilan Agama Lolak.
4. Meningkatkan Kajian Syari'ah Sebagai Sumber Hukum Materil Pengadilan Agama Lolak.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Agama Lolak melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Lolak setiap tahun merencanakan, menyusun dan membuat Program Kerja. Program Kerja pada dasarnya meliputi uraian tugas pokok pada setiap bagian unit organisasi dan mekanisme pelaksanaannya berupa pelaporan serta pengawasannya.
2. Pengadilan Agama Lolak setiap tahun merencanakan, menyusun dan membuat pembagian tugas (job description) yaitu membagi tugas pokok organisasi ke seluruh Sub Bagian dan staf untuk mewujudkan pelaksanaan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas.
3. Ketua Pengadilan telah membuat suatu keputusan dengan menunjuk masing-masing menjadi Pengawas Bidang (Hawasbid) yaitu menindaklanjuti Keputusan Ketua MA RI No. KMA/080/SK/VII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

4. Penyelesaian perkara maksimal dalam waktu 6 bulan.
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Agama Lolak dengan mengikutsertakan pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, lembaga lainnya maupun di lingkungan Pengadilan Agama sendiri.
6. Turut serta melakukan pembaruan sistem Peradilan yang berwibawa, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana cetak biru (blue print) yang dibuat oleh Mahkamah Agung
7. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi di era globalisasi ini, Pengadilan Agama Lolak sudah mempunyai website (laman) dengan Home Page : www.pa-lolak.go.id, Selain sebagai bentuk tindak-lanjut pembaruan MARI, juga sebagai bentuk pelaksanaan amanat Keputusan Ketua MARI No. 144/KMA/SKIVIII/2007 tahun 2007 berupa Transparasi Peradilan, serta membantu kelancaran tugas sehingga Asas Peradilan Beracara Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dapat tercapai.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III TA 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Lolak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian

Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Lolak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Agama Lolak dalam penyusunan dan penyajian

Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Lolak. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Lolak adalah sebagai berikut:

Pendapatan-

(1) Pendapatan- LRA

LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Agama Lolak adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening

Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai

nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal	0.5%

	jatuh tempo	
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos

Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas

dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat

pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Lolak telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan anggaran dari Mahkamah Agung untuk peningkatan jaringan.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Perpajakan	0	0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	2,477,787,000	2,477,787,000
Belanja Barang	1,118,900,000	1,118,900,000
Belanja Modal	0	10,000,000
Jumlah Belanja	3,596,687,000	3,606,687,000

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan Rp
0,-*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp. 0,- atau mencapai 00,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0,- Pendapatan Pengadilan Agama Lolak terdiri dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	0	-
Penerimaan Kembali Persekot	-	0	-
Jumlah	-	0	-

- *Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	0	0	0,00
Penerimaan Kembali Persekot	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

B.2 Belanja

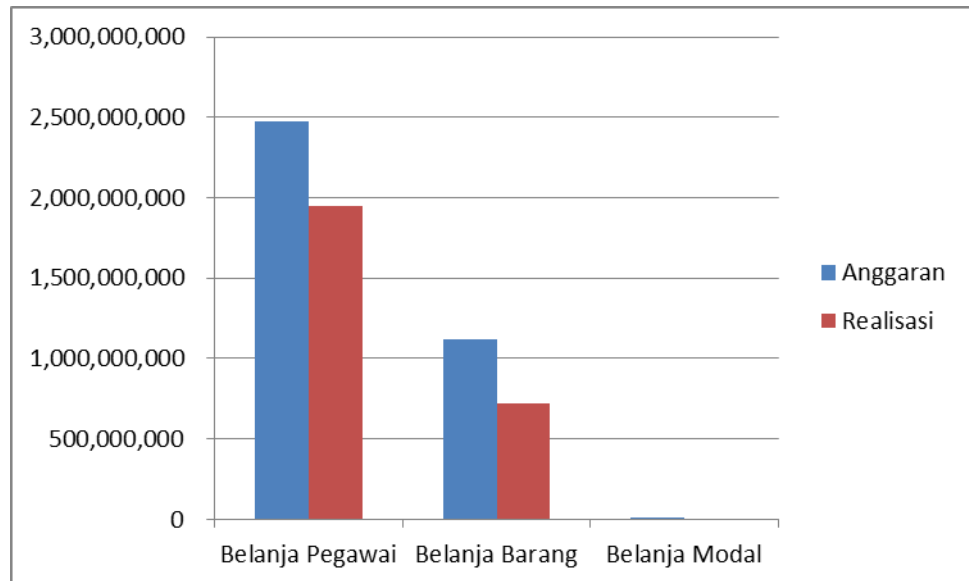
*Realisasi
 Belanja Negara
 Rp.
 2,672,265,125*

Realisasi Belanja instansi pada Triwulan III TA 2023 adalah sebesar Rp 2,672,265,125.- atau 74.09% dari anggaran belanja sebesar Rp 3,606,687,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester Triwulan III TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Triwulan III TA 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2,477,787,000	1,951,449,391	78.76%
Belanja Barang	1,118,900,000	720,815,734	64.42%
Belanja Modal	10,000,000	0	94.85%
Total Belanja Kotor	3,606,687,000	720,815,734	74.09%
Pengembalian		0	0.00%
Jumlah	3,606,687,000	2,672,265,125	74.09%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Berikut adalah perbandingan realisasi belanja untuk periode 30 September 2023 dan tahun sebelumnya.

*Perbandingan Realisasi Belanja Per 30 September
 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1,951,449,391	1,853,347,981	5%
Belanja Barang	720,815,734	1,020,823,693	-29%
Belanja Modal	0	406,170,000	-100%
Jumlah	2,672,265,125	3,280,341,674	-18%

B.2 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai Per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1,951,449,391,- dan Rp 1,853,347,159,- *Rp Rp* Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai Per 30 September 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,951,449,391	1,853,347,981	5,29
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	1,951,449,391	1.850.122.536	5,29
Pengembalian Belanja Pegawai	0	822	99
Jumlah Belanja	1,951,449,391	1,853,347,159	5,29

B.3 Belanja Barang

Belanja Barang Realisasi Belanja Barang Per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 720,815,734,- dan Rp 1,020,823,693,- *Rp.720,815,734* ,-

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	375,228,482	527,554,846	(28,87)
Belanja Barang Non Operasional	3,860,000	5,000,000	(22,8)
Belanja Jasa	55,080,000	205,806,228	(73,23)
Belanja Pemeliharaan	176,804,602	154,924,669	14,12

Belanja Perjalanan Dalam Negeri	65,299,650	77,748,000	(16)
Belanja Barang Persediaan	44,543,000	49,789,950	(10,5)
Jumlah Belanja Kotor	720,815,734	1,020,823,693	(29,38)
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja	720,815,734	1,020,823,693	(29,38)

B.4 Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp 0*

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan 406,170,000,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	406,170,000	(100)
Belanja Modal Gedung dan bangunan	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	406,170,000	(100)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	0	406,170,000	(100)

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp 0*

Realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin sampai dengan periode Triwulan III 2023 ini sebesar Rp. 0

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Alat Pengolah Data	0	406,170,000	(100)
Meubelair Kantor	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	406,170,000	(100)

Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	0	406,170,000	(100)

B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 adalah sebesar Rp. 0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp17.000.000*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 17.000.000 dan Rp. 51,265,000 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	THN 2023	THN 2022
BRI Cabang Kotamobagu	-	-
Uang Tunai	17.000.000	-
Jumlah	17.000.000	-

Persediaan

C.2. Persediaan

Rp. 1,164,000

Nilai Persediaan per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 1,164,000 dan Rp 45.000,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	THN 2023	THN 2022
Barang Konsumsi	1,164,000	45.000
Bahan untuk Pemeliharaan	0	0
Jumlah	1,164,000	45.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah

C.3 Tanah

Rp 1.064.172.000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Lolak per 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 1.064.172.000 dan Rp 1.064.172.000 . Tidak ada Kenaikan nilai aset tetap Tanah. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	1.064.172.000
Mutasi Tambah :	

Pembelian	0
Mutasi Kurang :	
Penyitaan Pengadilan	0
Saldo per 30 September 2023	1.064.172.000

*Peralatan dan
Mesin
Rp2,708,314,940*

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 September 2023 dan 2022 adalah Rp 2,708,314,940,- dan Rp 969.070.690 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	2,708,314,940
Mutasi Tambah :	
Pembelian	
Hibah Barang	
Koreksi Tambah	
Mutasi Kurang :	
Penghentian dari Penggunaan	
Saldo per 30 September 2023	2,708,314,940
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2023	(1,381,096,738)
Nilai Buku per 30 September 2023	1,327,218,202

*Gedung dan
Bangunan
Rp
21,862,883,248*

C.5 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 September 2023 dan 2022 adalah Rp 21,862,883,248 dan Rp 21,862,883,248. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	22,770,510,186
Mutasi Tambah :	
Mutasi Kurang :	
Saldo per 30 September 2023	22,770,510,186
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2023	(907,626,938)
Nilai Buku per 30 September 2023	21,862,883,248

Tidak ada mutasi tambah maupun kurang untuk aset ini.

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp0*

C.6 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	0
Mutasi Tambah :	
Mutasi Kurang :	
Saldo per 30 September 2023	
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2023	
Nilai Buku per 30 September 2023	0

Tidak ada Mutasi tambah maupun kurang pada periode pelaporan ini.

C.7 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp 357.209*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 September 2023 dan 2022 adalah Rp 357.209 dan Rp 0. Aset tetap tersebut berupa barang Monografi atau buku yang disimpan di Perpustakaan Kantor.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	357.209
Mutasi Tambah :	
Mutasi Kurang :	
Saldo per 30 September 2023	357.209
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2023	
Nilai Buku per 30 September 2023	357.209

Tidak ada Mutasi tambah maupun kurang pada periode pelaporan ini.

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
 Penyusutan
 Aset Tetap
 Rp(907,626,938)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp (907,626,938) dan Rp (687,541,145). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.708.314.940	(1.381.096.738)	1.327.218.202
2	Gedung dan Bangunan	22.770.510.186	(907.626.938)	21.862.883.248
	Jumlah	25.478.825.126	(1.288.723.676)	23.190.101.450

C.10 Aset Tak Berwujud

*Aset Tak
 Berwujud Rp 0,-*

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 0 dan Rp 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	0
Mutasi Tambah :	
Mutasi Kurang :	
Saldo per 30 September 2023	
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2023	
Nilai Buku per 30 September 2023	0

Tidak ada Mutasi pada Aset Tak Berwujud.

C.11 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp 0

Saldo Aset Lain-lain per 30 September 2023 dan 2022 adalah Rp 0 dan Rp 0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	0
Mutasi Tambah :	
Mutasi Kurang :	
Saldo per 30 September 2023	
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2023	
Nilai Buku per 30 September 2023	0

Tidak ada Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain pada periode pelaporan ini.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp 0 **C.12 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp 0 dan Rp 0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Uang Muka dari KPPN Rp17.000.000 **C.13 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp17.000.000 dan Rp51,265,000. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Ekuitas Rp24,049,010,046 **C.14 Ekuitas**

Ekuitas per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 24,049,010,046 dan Rp 24,961,858,457. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP
Rp. 0*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 30
September 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Lainnya	0	0	0
Jumlah	0	0	0

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp 2,096,409,456 Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2,096,409,456 dan Rp. 2,019,511,636,-

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pegawai	2,096,409,456	2,019,511,636	(3,80)
Jumlah	2,096,409,456	2,019,511,636	(3,80)

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp 35,398,000

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 35,398,000 dan Rp 37,931,850. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan	35,398,000	37,931,850	(6,68)
Jumlah	35,398,000	37,931,850	(6,68)

Beban Barang dan Jasa Rp 457,112,482

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 457,112,482 dan Rp 761,305,074. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau

jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Barang dan Jasa	457,112,482	761,305,074	(39.957)
Jumlah	457,112,482	761,305,074	(39.957)

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 206,594,150.- dan Rp 156,773,269. *Beban Pemeliharaan* merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan	206,594,150	156,773,269	31.77
Jumlah	206,594,150	156,773,269	31.77

Beban
 Perjalanan
 Dinas Rp
 65,299,650

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 65,299,650 dan Rp 77,748,000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas	65,299,650	77,748,000	6,81
Jumlah	65,299,650	77,748,000	6,81

Beban
 Penyusutan dan
 Amortisasi Rp
 470,687,048

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 470,687,048 dan Rp 447,096,507.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	246,992,431	218,470,547	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	227,738,367	228,625,960	
Jumlah Penyusutan	470,687,048	447,096,507	
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	0	0	
Jumlah Amortisasi	0	0	
Jumlah Penyusutan dan Amortisasi	470,687,048	447,096,507	

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Rp
0

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	THN 2023	THN 2022	NAIK TURUN %
Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	267,193,824	(100)
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	267,193,824	(100)
Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional	0	0	0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp
24,679,939,457

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 24,679,939,457 dan Rp 24,973,651,124.

Defisit LO
Rp
(3,331,500,786)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp (3,331,500,786) dan Rp (3,233,172,512). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian
Nilai Aset
Persediaan Rp
0

E.3 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian / Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Bahan untuk Pemeliharaan	0
Jumlah	0

Koreksi Nilai
Aset Tetap Rp0

E.7 Koreksi Nilai Aset Tetap

Koreksi atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Nilai Koreksi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Koreksi
Aset Tetap Lainnya	0
Monografi	
Jumlah	0

Ekuitas Akhir **E.10 Ekuitas Akhir**

Rp24,049,010,046

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 24,049,010,046 dan Rp 24,959,130,390.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah periode pelaporan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1 Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Untuk Periode Pelaporan ini Pengadilan Agama Lolak telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan terdapat temuan atas pemeriksaan tersebut. Dari hasil temuan tersebut, sementara dilakukan tindak lanjutnya.

F.2.2 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada periode pelaporan ini.

F.2.3 Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Lolak adalah :

- Nama Rekening : BPG 158 PENGADILAN AGAMA LOLAK 01, Nomor Rekenig : 653244018881000 pada

Bank Rakyat Indonesia Cab. Kotamobagu. Saldo 30 September 2021 sebesar Rp.0.-

Persetujuan Kembali Pembukaan Rekening dari KPPN Manado Nomor : S-1407/WPB.12/KP.06/2021 Tanggal 27 Mei 2021.

F.2.4 Revisi DIPA

DIPA Pengadilan Agama Lolak Nomor DIPA-005.01.2.401888/2023 Tanggal 16 November 2022 Sampai pada periode pelaporan ini telah melakukan revisi DIPA sebanyak 3 kali. Revisi DIPA yang dilakukan berupa revisi POK yaitu sebagai berikut:

- Revisi Ke-1 tanggal 18 April 2023, revisi akun belanja barang
- Revisi Ke-2 tanggal 18 Juli 2023, revisi akun belanja barang
- Revisi Ke-3 tanggal 4 September 2023, revisi akun belanja barang

F.2.5 Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat Ralat SPM, SSBP, dan SSPB untuk periode pelaporan ini.

F.2.6 Catatan Penting Lainnya

Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Lolak ditunjuk oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Pengguna Anggaran melalui Surat Keputusan Nomor : 55/PA/SK/XII/2022 Tanggal 1 Desember 2022. Selanjutnya Sekretaris Pengadilan Agama Lolak menindaklanjuti dengan Keputusan Nomor : W18-A7/01/KP.04.6/I/2023 Tanggal 2

Januari 2023 tentang Penunjukkan/Pengangkatan Pejabat
Sekretariat Pengelola Pengguna Anggaran.

Susunan Pejabat Pengelola Keuangan Pengadilan Agama
Lolak :

Kuasa Pengguna Anggaran : Rachmat Enoch, S.Ag

Pejabat Pembuat Komitmen : Rachmat Enoch, S.Ag

Pejabat Penandatangan / Penguji SPM : Zweetly Daryono
Soeratinoyo, S.Kom

Bendahara : Idrus Buhari, S.H.I

LAMPYRAN

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (401888) PENGADILAN AGAMA LOLAK

Tgl Data : 24/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 24/10/23 9:55 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	17,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,164,000	0
0.0	131111	Tanah	1,064,172,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,708,314,940	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	22,770,510,186	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	357,209	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,381,096,738
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	907,626,938
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	162,077,065
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	44,707,548
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	17,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,672,265,125
0.0	313221	Transfer Masuk	0	28,306,250
0.0	391111	Ekuitas	0	24,679,939,457
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	975,408,660	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	16,849	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	77,462,620	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	21,782,560	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	24,120,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	677,410,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	76,748,807	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	60,687,960	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	114,467,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	12,955,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	55,350,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	345,942,192	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	43,440,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	8,790,290	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	3,860,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	55,080,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	145,932,364	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	52,635,786	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	65,299,650	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	242,948,681	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	227,738,367	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	35,398,000	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	8,026,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (401888) PENGADILAN AGAMA LOLAK

Tgl Data : 24/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 24/10/23 9:55 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			29,893,019,121	29,893,019,121

Keterangan :

FINAL

LOLAK, 24 Oktober 2023

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

Rachmat Enoch, S.Ag

197602092008051001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (401888) PENGADILAN AGAMA LOLAK

Tgl Data : 24/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 24/10/23 9:55 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	2,672,265,125
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	895,769,060	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15,579	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	70,945,800	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	20,006,492	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	22,110,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	621,915,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	71,417,480	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	55,690,980	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	131,584,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	12,045,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	49,950,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	322,998,192	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	43,440,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	8,790,290	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	3,860,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	44,543,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	55,080,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	124,168,816	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	52,635,786	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	65,299,650	0
JUMLAH			2,672,265,125	2,672,265,125

Keterangan :

FINAL

LOLAK, 24 Oktober 2023

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

Rachmat Enoch, S.Ag

197602092008051001

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 401888 PENGADILAN AGAMA LOLAK

Tgl.Data : 30/10/23 6:00 AM
Tgl.Cetak : 30/10/23 10:53 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	1,164,000
131111	Tanah	1,064,172,000
132111	Peralatan dan Mesin	2,708,314,940
133111	Gedung dan Bangunan	22,770,510,186
135121	Aset Tetap Lainnya	357,209
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1,381,096,738)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(907,626,938)
J U M L A H		24,255,794,659

Lolak, 23 Februari 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

RACHMAT ENOCH, S,Ag
197602092008051001

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 401888 PENGADILAN AGAMA LOLAK

Tgl Data : 30/10/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 30/10/23 10:54 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 SEPTEMBER 2023						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
131111	Tanah		5,000	1,064,172,000	0	0	0	0	1,064,172,000
20101	TANAH PERSIL	-	5,000	1,064,172,000	0	0	0	0	1,064,172,000
132111	Peralatan dan Mesin		305	2,708,314,940	(1,134,104,307)	(246,992,431)	0	(1,381,096,738)	1,327,218,202
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	3	309,225,000	(173,183,929)	(22,087,501)	0	(195,271,430)	113,953,570
30501	ALAT KANTOR	-	30	251,500,000	(89,710,000)	(25,150,000)	0	(114,860,000)	136,640,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	200	945,199,620	(376,435,664)	(93,064,960)	0	(469,500,624)	475,698,996
30601	ALAT STUDIO	-	8	63,817,820	(12,463,382)	(6,381,782)	0	(18,845,164)	44,972,656
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	1	3,500,000	(3,150,000)	(350,000)	0	(3,500,000)	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	1	385,170,000	(38,517,000)	(19,258,500)	0	(57,775,500)	327,394,500
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	2	18,420,000	(8,058,750)	(1,151,250)	0	(9,210,000)	9,210,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	2	7,130,000	(2,673,750)	(891,250)	0	(3,565,000)	3,565,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	35	477,450,910	(237,373,565)	(52,306,365)	0	(289,679,930)	187,770,980
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	23	246,901,590	(192,538,267)	(26,350,823)	0	(218,889,090)	28,012,500
133111	Gedung dan Bangunan		1	22,770,510,186	(679,888,571)	(227,738,367)	0	(907,626,938)	21,862,883,248
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	1	22,770,510,186	(679,888,571)	(227,738,367)	0	(907,626,938)	21,862,883,248
135121	Aset Tetap Lainnya		3	357,209	0	0	0	0	357,209
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	3	357,209	0	0	0	0	357,209
JUMLAH			5,309	26,543,354,335	(1,813,992,878)	(474,730,798)	0	(2,288,723,676)	24,254,630,659

Lolak, 23 Februari 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

RACHMAT ENOCH, S,Ag
197602092008051001

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (401888) PENGADILAN AGAMA LOLAK

Tgl Data : 24/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 24/10/23 9:54 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,096,409,456	2,019,511,636	76,897,820	3.808
Beban Persediaan	35,398,000	37,931,850	(2,533,850)	(6.68)
Beban Barang dan Jasa	457,112,482	761,305,074	(304,192,592)	(39.957)
Beban Pemeliharaan	206,594,150	156,773,269	49,820,881	31.779
Beban Perjalanan Dinas	65,299,650	77,748,000	(12,448,350)	(16.011)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (401888) PENGADILAN AGAMA LOLAK

Tgl Data : 24/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 24/10/23 9:54 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	470,687,048	447,096,507	23,590,541	5.276
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	3,331,500,786	3,500,366,336	(168,865,550)	(4.824)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3,331,500,786)	(3,500,366,336)	168,865,550	(4.824)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	267,193,824	(267,193,824)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	267,193,824	(267,193,824)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	267,193,824	(267,193,824)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3,331,500,786)	(3,233,172,512)	(98,328,274)	3.041
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3,331,500,786)	(3,233,172,512)	(98,328,274)	3.041

Keterangan :

FINAL

LOLAK, 24 Oktober 2023
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS

Rachmat Enoch, S.Ag
197602092008051001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (401888) PENGADILAN AGAMA LOLAK

Tgl Data : 24/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 24/10/23 9:54 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	24,679,939,457	24,973,651,124	(293,711,667)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,331,500,786)	(3,233,172,512)	(98,328,274)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2,700,571,375	3,218,651,778	(518,080,403)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(630,929,411)	(14,520,734)	(616,408,677)	-
EKUITAS AKHIR	24,049,010,046	24,959,130,390	(910,120,344)	-

Keterangan :

FINAL

LOLAK, 24 Oktober 2023

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

Rachmat Enoch, S.Ag

197602092008051001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA LOLAK 401888

Tgl Data : 24/10/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 24/10/23 9:55 AM
Halaman : 2
lap_ira_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	3,606,687,000	2,672,265,125	934,421,875	74	3,742,722,000	3,280,340,852	462,381,148	88
C	PEMBIAYAAN				0				0

Keterangan :
FINAL

LOLAK, 24 Oktober 2023
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS

Rachmat Enoch, S.Ag
197602092008051001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 1700 **SULAWESI UTARA**
SATUAN KERJA : 401888 **PENGADILAN AGAMA LOLAK**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 24/10/23 9:56 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satkr
 Tgl Data : 24/10/23 6:56 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	531,796,000	531,796,000	895,769,060	0	895,769,060	168.44	(363,973,060)
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19,000	19,000	15,579	0	15,579	81.99	3,421
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	47,371,000	47,371,000	70,945,800	0	70,945,800	149.77	(23,574,800)
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	16,344,000	16,344,000	20,006,492	0	20,006,492	122.41	(3,662,492)
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28,140,000	28,140,000	22,110,000	0	22,110,000	78.57	6,030,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,332,587,000	1,332,587,000	621,915,000	0	621,915,000	46.67	710,672,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	142,804,000	142,804,000	71,417,480	0	71,417,480	50.01	71,386,520
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	47,443,000	47,443,000	55,690,980	0	55,690,980	117.39	(8,247,980)
511129	Belanja Uang Makan PNS	214,368,000	214,368,000	131,584,000	0	131,584,000	61.38	82,784,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	52,115,000	52,115,000	12,045,000	0	12,045,000	23.11	40,070,000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	64,800,000	64,800,000	49,950,000	0	49,950,000	77.08	14,850,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	2,477,787,000	2,477,787,000	1,951,449,391	0	1,951,449,391	78.76	526,337,609
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	2,477,787,000	2,477,787,000	1,951,449,391	0	1,951,449,391	78.76	526,337,609
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	547,072,000	551,572,000	322,998,192	0	322,998,192	58.56	228,573,808
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	70,476,000	70,476,000	43,440,000	0	43,440,000	61.64	27,036,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	22,500,000	18,000,000	8,790,290	0	8,790,290	48.83	9,209,710
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	640,048,000	640,048,000	375,228,482	0	375,228,482	58.63	264,819,518
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	4,332,000	4,332,000	3,860,000	0	3,860,000	89.1	472,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	4,332,000	4,332,000	3,860,000	0	3,860,000	89.1	472,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	45,600,000	45,600,000	44,543,000	0	44,543,000	97.68	1,057,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	45,600,000	45,600,000	44,543,000	0	44,543,000	97.68	1,057,000
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000
522141	Belanja Sewa	91,800,000	91,800,000	55,080,000	0	55,080,000	60	36,720,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	103,800,000	103,800,000	55,080,000	0	55,080,000	53.06	48,720,000
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	168,300,000	168,300,000	124,168,816	0	124,168,816	73.78	44,131,184
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	71,510,000	71,510,000	52,635,786	0	52,635,786	73.61	18,874,214

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 1700 **SULAWESI UTARA**
SATUAN KERJA : 401888 **PENGADILAN AGAMA LOLAK**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 24/10/23 9:56 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 24/10/23 6:56 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	239,810,000	239,810,000	176,804,602	0	176,804,602	73.73	63,005,398
5241 524111	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Biasa	85,310,000	85,310,000	65,299,650	0	65,299,650	76.54	20,010,350
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	85,310,000	85,310,000	65,299,650	0	65,299,650	76.54	20,010,350
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,118,900,000	1,118,900,000	720,815,734	0	720,815,734	64.42	398,084,266
53 5321 532111	BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
	JUMLAH BELANJA	3,596,687,000	3,606,687,000	2,672,265,125	0	2,672,265,125	74.09	934,421,875

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : 1700
SATUAN KERJA : 401996

MAHKAMAH AGUNG
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
SULAWESI UTARA
PENGADILAN AGAMA LOLAK

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 25/10/23 9:27 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	360,000	0	0	0	0
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	7,460,000	3,810,000	0	3,810,000	51.07
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	24,070,000	13,800,000	0	13,800,000	57.33
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	32,839,000	21,295,000	0	21,295,000	64.85
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	64,729,000	38,905,000	0	38,905,000	60.1
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	64,729,000	38,905,000	0	38,905,000	60.1
	JUMLAH PENDAPATAN	64,729,000	38,905,000	0	38,905,000	60.1

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA
SATUAN KERJA : (401888) PENGADILAN AGAMA LOLAK

Tgl Data : 24/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 24/10/23 9:55 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	17,000,000	51,265,000	(34,265,000)	(66.84)
Persediaan	1,164,000	45,000	1,119,000	2,486.67
JUMLAH ASET LANCAR	18,164,000	51,310,000	(33,146,000)	(64.60)
ASET TETAP				
Tanah	1,064,172,000	1,064,172,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,708,314,940	2,675,964,940	32,350,000	1.21
Gedung dan Bangunan	22,770,510,186	22,770,510,186	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	357,209	357,209	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,288,723,676)	(1,813,992,878)	(474,730,798)	26.17
JUMLAH ASET TETAP	24,254,630,659	24,697,011,457	(442,380,798)	(1.79)
JUMLAH ASET	24,272,794,659	24,748,321,457	(475,526,798)	(1.92)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	206,784,613	17,117,000	189,667,613	1,108.07
Uang Muka dari KPPN	17,000,000	51,265,000	(34,265,000)	(66.84)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	223,784,613	68,382,000	155,402,613	227.26
JUMLAH KEWAJIBAN	223,784,613	68,382,000	155,402,613	227.26
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	24,049,010,046	24,679,939,457	(630,929,411)	(2.56)
JUMLAH EKUITAS	24,049,010,046	24,679,939,457	(630,929,411)	(2.56)
JUMLAH EKUITAS	24,049,010,046	24,679,939,457	(630,929,411)	(2.56)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	24,272,794,659	24,748,321,457	(475,526,798)	(1.92)

Keterangan :

FINAL

LOLAK, 24 Oktober 2023
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS

Rachmat Enoch, S.Ag
197602092008051001